

Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Simalungun

Wico Jontarudi Tarigan^{1*}, Djuli Sjafei Purba² & Mahaitin H Sinaga³

¹²³Universitas Simalungun

*Corresponding author, e-mail: ico180285@gmail.com

ARTICLE INFO

Received 31 Maret 2023

Accepted 17 April 2023

Published 18 April 2023

Keywords : Financial Management, Government Expenditure, Community Income

DOI :

<http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v6i1.1447>

4

ABSTRACT

In order to create public welfare and be able to enhance community welfare, the government must be able to manage the available resources. This study was conducted to determine the impact of government spending and budget management on the income of residents in Simalungun Regency. Data were gathered for this study using the purposive sampling technique to obtain secondary data for each variable. Multiple linear regression is the data analysis method employed, and the F test and t test are used to examine the significance of the effect jointly. The partial regression coefficients are tested using the t test. The heteroscedasticity test, multicollinearity test, and autocorrelation test were all performed as part of the standard assumption test. The results of this study demonstrate that budget management and government expenditure have a positive and significant impact on people's incomes concurrently and in part. In this study, these two variables correctly predicted the income of Simalungun Regency residents 96% of the time, with the remaining 4% being influenced by additional variables not included in the research model.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan nasional, semua wilayah negara bekerja sama untuk membangun negara.. Agar UUD 1945 dapat dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional, maka harus ada pemerataan hasil pembangunan (Mahadiansar, et al, 2020). Pembangunan adalah usaha yang disengaja oleh suatu masyarakat untuk memajukan kesejahteraannya. Keinginan masyarakat untuk kesejahteraannya sendiri adalah hal yang wajar (Yorisca, 2020). Distribusi pendapatan dan kekayaan pada kenyataannya tampak tidak adil dan tidak merata, yang berdampak pada pertumbuhan penduduk miskin (Aprianto, 2017). Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan melalui asas desentralisasi dan

menyangkut pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, merupakan lambang pembangunan daerah di Indonesia. Perbedaan regional dalam kemajuan, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita ada (Noviar, 2021).

Kemampuan unit kerja untuk berhasil mengelola anggarannya merupakan tanda bahwa kinerjanya secara keseluruhan baik (Miharto, 2020). Transparansi pengelolaan keuangan dan anggaran di lembaga publik, termasuk Pemerintah Daerah, diperlukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran akhir. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat ditentukan dari tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi daerah yang diukur dari keberhasilan keuangannya (Krisniawati, 2021). Organisasi publik harus akuntabel jika ingin menjadi landasan pembenaran bagi semua pihak (stakeholders), internal dan eksternal, yang berkepentingan untuk menilai operasi dan hasil organisasi publik (Herizal, Mukhrijal, & Wance, 2020); (Wicaksono, 2015) Kebijakan, inisiatif, dan proses dievaluasi untuk akuntabilitas publik, serta kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum (Martini, Arimbi, & Sari, 2020).

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan di bawah sistem pemerintahan saat ini untuk mengembangkan daerahnya masing - masing (Yuliasuti & Riharjo, 2020). Pengeluaran pemerintah memperhitungkan pengeluaran yang diperlukan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang menuntut pembelian barang dan jasa (Wijanarkow, 2020). Setiap daerah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhannya ekonominya dan menjadikannya tujuan ekonominya karena pertumbuhan ekonomilah yang pada akhirnya menentukan keberhasilan ekonomi jangka panjang suatu daerah (Kurniawan, Militina, & Suharto, 2018). Suatu kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana negara atau daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebagai dasar pelaksanaannya dalam akuntansi pemerintahan (Emu, 2018). Anggaran digunakan oleh badan legislatif dan eksekutif pemerintah sebagai instrumen politik untuk berkomitmen membelanjakan uang publik untuk tujuan tertentu (Ramadhani & Setiawan, 2019). Dalam upaya mewujudkan sistem pengelolaan anggaran yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat banyak, berbagai undang-undang dan perangkat hukum telah dibuat dan diberlakukan hingga saat ini (Halim, 2012). Kinerja organisasi sepanjang waktu dapat dinilai dengan menggunakan anggaran yang direncanakan dengan baik (Delia, et al, 2021)

Penganggaran adalah proses politik dalam organisasi sektor publik, dan publik harus diberi tahu agar dapat dikritik, diperdebatkan, dan diberikan pendapat (Mardiasmo, 2004). Menurut penelitian sebelumnya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara politik anggaran dengan penyerapan anggaran (Sanjaya, et al, 2018). Alat utama pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah (Efriza & Supena, 2021). Seberapa mudah konsumen memperoleh fakta dan informasi keuangan yang benar menentukan tingkat tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Rahma, 2017). Sistem akuntansi keuangan

daerah, penting untuk berbagi informasi dan meningkatkan efisiensi pemerintah daerah (Mulyanto, Budiman, & Fahmi, 2021). Sesuai dengan kewenangan yang diperoleh, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang mandiri untuk mengendalikan dan mengelola pemerintahan dalam hal membuat dan menggunakan anggaran, memutuskan struktur administrasi, dan menyusun dan melaksanakan kontrol internal (Suyono, 2020). Anggaran adalah deskripsi kinerja berbasis keuangan yang diantisipasi untuk dicapai selama periode waktu tertentu. Ini memberikan informasi tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mendanai proyek serta pengeluaran yang terkait dengan kegiatan yang diantisipasi (Gagola, Sondakh, & Warongan, 2017)

Bergantung pada susunan ekonomi daerah, pengeluaran daerah dapat mencakup biaya staf, biaya komoditas, hibah, subsidi, dan bantuan sosial. Sementara itu, belanja daerah dipecah menjadi kegiatan seperti pembangunan perumahan dan infrastruktur publik, serta belanja untuk hal-hal seperti pariwisata, infrastruktur publik, keagamaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pengeluaran pemerintah Indonesia terutama dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada neraca anggaran pendapatan dan belanja negara (Kosali, 2021). Menurut (Sukirno, 2016) Pengeluaran oleh pemerintah mengacu pada pembelian barang dan jasa serta pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Ada dua kategori teori yang dapat digunakan untuk mengkategorikan pengeluaran pemerintah: teori makro dan teori mikro (Pateda, Masinambow & Rotinsulu, 2019). Menurut Bastian dalam (Saputra, Suwendra & Yudiaatmaja, 2016) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran tunai, difokuskan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan akan berdampak pada konsumsi, dan biasanya terlihat bahwa ketika pendapatan meningkat, kekhawatiran tentang kualitas barang yang dikonsumsi juga ikut meningkat (Nababan, 2013).

Sumber otonomi daerah sangat bergantung pada peran yang akan dimainkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yusmalina et al, 2020). Produk Domestik Regional Bruto (PDB), yang mencakup semua pendapatan yang dihasilkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui tenaga kerja produktif, adalah nilai pasar dari semua produk dan jasa jadi yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu (Asmuruf et al, 2015). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan perkembangan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan rata - rata. Rendahnya kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan daerah lebih lanjut ditunjukkan oleh ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk pendanaan (Weley, Kumenaung, & Sumual, 2019). Jumlah pendapatan yang dihasilkan setelah membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk berfungsi sebagai ukuran kesejahteraan penduduk (Tarigan, 2020). PDRB adalah metrik yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk menilai seberapa baik pemerintah menggunakan sumber daya yang tersedia (Juniarsih, 2021).

(Sendow, Rotinsulu, & Kawung, 2019), Kesimpulan analisis menunjukkan bahwa Alokasi Pengeluaran Langsung secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi PDRB.

Pertumbuhan belanja langsung akan menghasilkan peningkatan PDRB. Berlawanan dengan alokasi biaya tidak langsung, hal ini berdampak kecil atau tidak sama sekali terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Manado (Sendow et al., 2019) Pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan investasi semuanya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Pamungkas, 2010) melakukan penelitian dengan judul Manajemen Anggaran dan Kinerja Puskesmas Kajian di Puskesmas Danurejan I Yogyakarta, dalam rangka mensosialisasikan tujuan pelayanan Puskesmas Danurejan I Yogyakarta, penelitian ini menganalisis program subsidi pemerintah. Bagian ini juga mengkaji seberapa baik Puskesmas mengelola anggarannya dari tahun 2007 hingga 2009. Pembentukan Kabupaten Simalungun tersebut menyebabkan perubahan struktur ekonomi secara menyeluruh, yang meliputi : pembagian luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan. Dari aspek ekonomi, seyogyanya pembentukan Kabupaten Simalungun juga dapat mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya melalui optimalisasi dan pengelolaan sumber - sumber anggaran daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (peningkatan pendapatan masyarakat). Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan anggaran dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Simalungun

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kuantitas laporan data PDRB, belanja daerah, dan realisasi penggunaan APBD Kabupaten Simalungun. Purposive sampling, atau memilih sampel untuk penelitian ini berdasarkan kriteria atau perhatian tertentu. Pengambilan sampel penelitian menggunakan informasi dari Kantor BPS Kabupaten Simalungun, Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun, Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun, dan data Bappeda Kabupaten Simalungun.

Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Pengertian	Indikator
Pengelolaan Anggaran Pemerintah (X_1)	Semua kegiatan secara bersama-sama, termasuk pengawasan daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi. Pemerintah daerah harus berpegang teguh pada asas penganggaran sektor publik dalam mengelola keuangan dan anggaran	Realisasi Anggaran Kabupaten Simalungun 2010 – 2019.
Pengeluaran Pemerintah (APBD) (X_2)	Peraturan daerah mengamanatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.	APBD Anggaran Kabupaten Simalungun 2010 – 2019.

Pendapatan Masyarakat (PBDR) (Y)	Total pengeluaran domestik untuk barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, total pendapatan domestik yang mencakup pendapatan dari faktor produksi milik asing, atau nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dalam periode waktu tertentu	PDRB Kabupaten Simalungun 2010 – 2019
----------------------------------	--	---------------------------------------

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	6011057.416	725789.511		8.282	.000
Pengelolaan Anggaran Pemerintah	1.665E-6	.000	.158	6.308	.000
Pengeluaran Pemerintah	7.285E-6	.000	.824	5.773	.001

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Hal ini terbukti dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS persamaan regresi. Persamaan regresi berikut dibuat:

$$Y = 6011057.416 + 1.665E-6 X_1 + 7.285E-6 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Nilai pendapatan masyarakat di Kabupaten Simalungun ditunjukkan positif dengan konstanta 601.1057.416 sebelum dipengaruhi oleh variabel pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah
- Mengingat variabel independen lainnya dianggap konstan, koefisien $b_1 = 1,665E-6$ menunjukkan bahwa peningkatan nilai pengelolaan anggaran pemerintah (X_1) akan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar $1,665E-6$. Koefisiennya positif, menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan masyarakat dengan seberapa baik pemerintah mengelola anggarannya di Kabupaten Simalungun. Semakin tinggi pendapatan penduduk di Kabupaten Simalungun maka semakin baik pula pengelolaan anggaran pemerintah yang ada.
- Dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan, koefisien $b_2 = 7,285E-6$ menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah (X_2) sebesar 1 poin akan menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar $7,285E-6$. Koefisien positif menunjukkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan

masyarakat; semakin banyak uang yang dikeluarkan pemerintah di Kabupaten Simalungun maka semakin besar pula pendapatan penduduknya

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel 3. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1 (Constant)	6011057.416	725789.511		8.282	.000
Pengelolaan Anggaran Pemerintah	1.665E-6	.000	.158	6.308	.000
Pengeluaran Pemerintah	7.285E-6	.000	.824	5.773	.001

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Menurut hipotesis pertama, pengelolaan anggaran pemerintah meningkatkan pendapatan penduduk Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil perhitungan data yang dilakukan dengan program SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,308 dan jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,812, $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan tingkat signifikansi yang dicapai lebih kecil sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$).

Akibatnya, H_0 diabaikan dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan penduduk Kabupaten Simalungun karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} melebihi nilai t_{tabel} .

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5.773 dan jika dibandingkan nilai t_{tabel} 1.812, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0.05 ($0.001 < 0.05$). Ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji F

Tabel 4. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	42935017922113.050	2	21467508961056.523	84.834	.000 ^b
Residual	1771375715726.952	7	253053673675.279		
Total	44706393637840.000	9			

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Pengelolaan Anggaran Pemerintah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel independen (pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah) memiliki signifikansi F_{hitung} sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, dan nilai F_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai F_{tabel} ($84,834 > 4,74$). Dengan demikian temuan analisis menunjukkan bahwa variabel bebas (pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah) secara bersama - sama berpengaruh besar terhadap pendapatan penduduk Kabupaten Simalungun.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.980 ^a	.960	.949	503044.405	.960	84.834	2	7	.000

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Pengelolaan Anggaran Pemerintah

b. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat

Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan analisis regresi menghasilkan koefisien R^2 sebesar 0,960 yang berarti bahwa 96 % variasi seluruh variabel independen (pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah) dapat dijelaskan oleh variabel dependen (pendapatan masyarakat), dengan sisa 4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 6. Kriteria Tingkat Hubungan Antar Variabel

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber : (Sugiyono, 2013)

Nilai R^2 sebesar 0,960 yang menunjukkan bahwa hubungan faktor pengelolaan anggaran dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Simalungun memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat, sesuai dengan tabel kriteria tingkat hubungan antar variabel.

Variabel Pengelolaan Anggaran (X_1) dan Pengeluaran Pemerintah (X_2) terhadap Pendapatan Masyarakat Kabupaten Simalungun diperoleh nilai F_{hitung} $84,834 > F_{tabel}$ yang berarti bahwa variabel Pengelolaan Anggaran (X_1) dan Pengeluaran Pemerintah (X_2) berpengaruh secara simultan (bersama) terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun. Hal ini diketahui berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan pengujian simultan. Dan dari uji koefisien determinasi diketahui bahwa pengelolaan anggaran (X_1) dan belanja pemerintah (X_2) berpengaruh sebesar 96 % (sama dengan koefisien determinasi) terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun (Y), dengan sisa 4 % pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain di luar model regresi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori dan kerangka konseptual yang menyatakan bahwa pengelolaan belanja dan anggaran pemerintah berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Variabel pengelolaan anggaran pemerintah (X_1) diperoleh koefisien sebesar $1,665E-6$, $t_{hitung} 6,308 > t_{tabel} 1,812$ yang artinya jika variabel pengelolaan anggaran pemerintah meningkat maka akan mempengaruhi pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun sebesar $1,665E-6$ dan signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$) berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan pengujian parsial. Hasilnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah di Kabupaten Simalungun memberikan dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa agar pengelolaan anggaran daerah dapat dilaksanakan, semua lapisan dan lapisan masyarakat harus dilibatkan. Selain itu, karena pemerintah daerah lebih paham dengan hasil yang diharapkan, mereka harus diberi wewenang untuk menangani dana daerah. Hal ini akan membatasi peran pemerintah hanya sebagai katalisator dan fasilitator. mencapai tujuan pembangunan. Sebagai katalis dan fasilitator, pemerintah jelas dituntut untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan karena lebih mengetahui maksud dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Variabel Pengeluaran Pemerintah (X_2) diperoleh koefisien sebesar $7,285E-6$, $t_{hitung} 5,772 > t_{tabel} 1,812$ yang artinya jika variabel Pengeluaran Pemerintah meningkat maka akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun sebesar $0,890$, menurut hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan pengujian parsial. Dengan kata lain pendapatan masyarakat di Kabupaten Simalungun akan meningkat sejalan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja pemerintah (APBD) Kabupaten Simalungun. Hasil studi ini menunjukkan bahwa belanja publik meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang dan pendek.

SIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun diharapkan dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk anggaran yang ada, semaksimal mungkin dengan pengelolaan anggaran pemerintah yang baik, efektif, dan efisien. Beberapa hal yang harus dilakukan agar anggaran pemerintah dapat dikelola dengan baik, antara lain pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendukung proyek-proyek yang berwawasan lingkungan, khususnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*community income*). Menurut temuan penelitian ini, pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga di Kabupaten Simalungun. Dalam membuat anggaran dan mendistribusikan sumber daya, Pemerintah Kabupaten Simalungun harus secara serius dan serius mengevaluasi konsekuensi dari situasi ini. Untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus dapat lebih efektif mendistribusikan dan mengelola anggaran belanja pemerintah dan mengoptimalkannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Orang miskin menjadi sasaran utama karena tindakan pemerintah tidak mempengaruhi mereka.

Karena kesehatan manusia juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal yang bersangkutan, pemerintah daerah harus memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran, terutama untuk sektor kesehatan dan pemberdayaan daerah pedesaan. Penyaluran anggaran dana untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan harus memperhatikan kebutuhan daerah dan kreatif, serta kemauan politik dan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana dengan cara yang akan meningkatkan kesejahteraan daerah. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Simalungun berencana menerapkan anggaran berbasis kinerja dan mengefektifkan belanja administrasi saat ini. Selama ini berlangsung, penyusunan anggaran berbasis kinerja akan memungkinkan untuk mengidentifikasi metrik atau indikator pencapaian tujuan dan sasaran entitas pemerintah daerah.

REFERENSI

- Aprianto, N. E. K. (2017). Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 73–96. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693>
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3).
- Asmuruf, Makdalena, F. V. A. R. dan G. M. . K. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Delia, T., Syahril Djaddang, Suratno, & JMV. Mulyadi. (2021). Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 116–131. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.77>
- Efriza, & Tri Rachmanto Supena. (2021). Proses Politik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2015. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i1.22>
- Emu, E. R. B. (2018). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015-2017*. STIE Perbanas Surabaya.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Juniarsih, T. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Di Aceh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh *Value*, 2(1), 29–44. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.119>
- Kosali, A. Y. (2021). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Kompeten*, 4(1), 63. <https://doi.org/10.51877/mnjam.v4i1.192>

- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2018). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *INOVASI*, 13(2), 82. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2453>
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1–11.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Asparyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Martini, R., Arimbi, D. C., & Sari, K. R. (2020). Penatausahaan Aset Tetap untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.009>
- Miharto mhs, E. (2020). Analisis Perencanaan Strategi, Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Efektifitas Pengendalian Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran Dan Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja (Sebuah Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(1), 132–138. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i1.352>
- Mulyanto, M., Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerin. *JBE (Jurnal Bingkai Ekonomi)*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.54066/jbe.v6i1.90>
- Nababan, S. S. M. (2013). Pendapatan dan jumlah tanggungan pengaruhnya terhadap pola konsumsi PNS dosen dan tenaga kependidikan pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), 2130–2141.
- Noviar, N. (2021). Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016 - 2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118>
- Pateda, Y.-, Masinambow, V. A. J., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3). <https://doi.org/10.35794/jpek.d.16455.19.3.2017>
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231>

- Rahma, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon*, 4(2).
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(2), 710–726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- Sadono Sukirno. (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. In *Rajawali Press*.
- Sanjaya, T., Arza, F. I., & Setiawan, M. A. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Akuntansi*, 2(4), 2–9.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2014. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1), 1–11.
- Sendow, J. E., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PDRB Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7). <https://doi.org/10.35794/jpekd.19895.19.7.2018>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono, N. A. (2020). Antecedent Variable Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(1), 79–91. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083>
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 2(2), 135–147. <https://doi.org/doi.org/10.36985/ekuilmomi.v2i2.380>
- Weley, I. R., Kumenaung, A. G., & Sumual, J. I. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3). <https://doi.org/10.35794/jpekd.16457.19.3.2017>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Wijanarkow, A. (2020). Pengeluaran Pemerintah. *Www.Slideshare.Net*. Retrieved from <https://www.slideshare.net/mobile/toinkarkow/pengeluaran-pemerintah>
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan : Usaha Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>
- Yuliasuti, E., & Riharjo, I. (2020). Pengaruh kompetensi petugas, pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10).

Yusmalina, Lasita, & Fauzan Haqiqi. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1(1), 13-21. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.66>